

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- A.Z. Abidin & Andi Hamzah, 2010, *Pengantar dalam Hukum Pidana Indonesia*, Yarsif Watampone, Jakarta
- Abintoro Prakoso, 2022, *Teori Hukum*, LaksBang Justicia, Yogyakarta.
- Adami Chazawi, 2016, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia (Edisi Revisi)*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Agus Rusianto, 2018, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana; Tinjauan kritis Melalui Konsistensi antara Asas, Teori dan Penerapannya*, Kencana, Jakarta.
- Asep N. Mulyana, 2021, *Rekonstruksi Paradigma Pemidanaan terhadap Kejahatan Korporasi & Bisnis*, Rajawali Pers, Depok.
- Andi Hamzah, 2015, *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Rajawali Pers, Depok.
- Bahrul Ilmi Yakup, 2020, *Dekonstruksi dan Reformulasi Hukum BUMN di Indonesia; Upaya Menciptakan BUMN Kesejahteraan rakyat*, GENTA Publishing, Yogyakarta.
- Bernard Arief Sidharta, 2009, *Refleksi Struktur Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Binoto Nadapdap, 2021, *Direksi Perseroan Terbatas; Narasi dari Ruang Kerja; Kajian Berdasarkan Parameter Hukum*, Jala Permata Aksara, Jakarta.
- Budiono Kusumohamidjojo, 2022, *Filsafat Hukum; Problematik Ketertiban yang Adil*, Yrama Widya, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2022, *Teori Hukum; Dilema antara Hukum dan Kekuasaan*, Yrama Widya, Bandung.
- CFG Sunaryati Hartono, 1994, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20*, Alumni, Bandung.
- Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana tanpa Kesalahan menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta.
- Eddy O.S. Hiariej, 2014, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Egi Primayogha & Yassa Aulia, 2022, *Tren Penindakan Kasus Korupsi BUMN 2016-2021*, ICW, Jakarta.
- Franz Magnis Suseno (cetakan kedua belas), 2023, *Etika Politik*, Gramadia, Jakarta.
- Hans Kelsen (penerjemah: Raisul M.), 2006, *Teori Hukum Murni; Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif*, Nusa Media, Bandung.

- Indriyanto Seno Adji, 2006, *Korupsi, Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana*, Diadit Media, Jakarta.
- Irsan Arief, 2023, *Nuansa Perdata dalam Perkara Pidana*, Mekar Cipta Lestari, Jakarta.
- J. Satrio, 2021, *Perseroan Terbatas (yang Tertutup) Berdasarkan UU No, 40 Tahun 2007, Bagian Kedua*, Rajawali Pers, Depok.
- Jan Remmelink, 2003, *Hukum Pidana; Komentar atas Pasal-pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia*, Gramedia, Jakarta.
- Jimly Asshddiqie & Ali Safat, 2022, *Seri Pemikir Hukum: Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Konpress, Jakarta.
- John Rawls, 2019, *A Theory of Justice; Teori Keadilan; Dasar-dasar Filasafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*; Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Karen Lebacqz (penerjemah: Yudi Santoso), 2015, *Teori-Teori Keadilan; Six Theories of Justices*, Nusa Media, Bandung.
- Kejaksaan Agung RI, 2024, *Laporan Tahunan Kejaksaan Republik Indonesia 2023*, Kejaksaan, Jakarta.
- Komariah Emong Sapardjaja, 2013, *Ajaran Sifat melawan Hukum Materil dalam Hukum Pidana Indonesia; Studi Kasus tentang Penerapan dan Perkembangannya dalam Yurisprudensi*, Alumni, Bandung.
- KPK-RI, 2006, *Memahami untuk Membasmi, Buku Panduan Memahami Tindak Pidana Korupsi*, KPK, Jakarta.
- Leden Marpaung. 1992, *Tindak Pidana Korupsi, Masalah dan Pemecahannya (Bagian Pertama)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 1992, *Tindak Pidana Korupsi, Masalah dan Pemecahannya (Bagian Kedua)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2022, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lilik Mulyadi, 2024, *Kapita Selekta Perkara Tindak Pidana Korupsi Indonesia; Persepektif Asas, Teoritis, Normatif dan Praktik Peradilan*, Kencana, Jakarta.
- M. Arif Setiawan dkk, 2019, *Menggugat Business Judgment Rules sebagai Tindak Pidana Korupsi; Kritik terhadap Putusan Perkara Korupsi Karen Agustawan*, Arti Bumi Intaran, Yogyakarta.
- M. Shidiqon Prabowo, 2018, *Dasar-Dasar Good Corporate Governance*, UII Press, Yogyakarta.
- M. Yahya Harahap, 2021, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marcus Priyo Gunarto & Wahyu Sudrajat, 2018, *Dekonstruksi Putusan Bebas & Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

- Maria SW. Sumardjono, 2021, *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, UGM, 2021, Yogyakarta.
- Mark Pieth, 2011, *Harmonising Anti-Corruption Compliance; The OECD Good Practice Guidance 2010*, Die Deutsche Bibliothek/DIKE, Belanda.
- Moeljatno, 2000, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rieneka Cipta, Jakarta.
- Muhammad Nurul Huda, 2014, *Tindak Pidana Korupsi*, Bina Karya, Jakarta.
- Muladi & Dwidja Priyatno, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana, Bandung.
- Munir Fuady, 2010, *Doktrin-doktrin dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Nindyo Pramono, 2024, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, & Daniel Suhardiman, 2024, *Hukum Perseroan Terbatas*, Rajawali Buana Pusaka, Depok.
- R. Luki Karunia & Zurrahma Rusyfan, 2021, *Good Corporate Governance (GCG) dan Komite Audit*, Zurra Infrigo Media, Bandung.
- Richard W. Wright, Juli 2011, *Private Nuisance Law: A Window on Substantive Justice* (RIGHTS AND PRIVATE LAW, Chapter 17, D. Nolan and A. Robertson, eds.), Hart Publishing, England.
- Ridwan, 2016, *Persinggungan Antar Bidang Hukum dalam Perkara Korupsi*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Ridwan Khairandy & Camelia Malik, 2007, *Good Corporate Governance; Perkembangan Pemikiran dan Implementasinya di Indonesia dalam Persepektif Hukum*, Kreasi Total Media, Yogyakarta.
- Ridwan Khairandim Hanafi Amrani & Dolli Setiawan Ritonga, 2018, *Korupsi Kerugian Keuangan Negara di BUMN*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Romli Atmasasmita, 2017, *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*, Gramedia, Jakarta.
- Rosa Agustina, 2003, *Perbuatan Melawan Hukum*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum UI, Depok.
- Roscoe Pound, 1996, *Pengantar Filsafat Hukum* (terjemahan), Bharata, Jakarta.
- Salim HS, Erliels Septina Nurbani, 2014, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Siswanto & Rudi Margono, 2025, *Esensi Niat Jahat (Mens Rea) dalam Perkara Korupsi yang Mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara*, Ikhlas Sukses Abadi, Depok
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2019, *Teori Hukum*, Maha Karya Pustaka, Yogyakarta.

Syarif Usman, 2021, *Implementasi Good Corporate Governance (GCG) di Perusahaan BUMN*, Mandar Maju, Bandung.

Tatu Aditya, 2022, *Potret Business Judgment Rule Praktik Pertanggungjawaban Pengelolaan BUMN*, Balai Pustaka, Jakarta

Topo Santoso, 2023, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Depok.

Wahyu Kurniawan, 2012, *Corporate Governance dalam Aspek Hukum Perusahaan*, Jakarta, Grafiti.

Yahya Harahap, 2021, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta.

### **Jurnal, Makalah, Artikel**

Mario Julyano, Aditya Yuli Sulistyawan, *Pemahaman terhadap Asas-asas Kepastian Hukum melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum*, JURNAL CREPIDO (e-ISSN: 2715-2863), 2019.

Nindyo Pramono, *Perbandingan Perseroan Terbatas di Beberapa Negara*, Karya Tulis Ilmiah, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), 2012.

Richard W. Wright, *"Causation (Contribution) and The 'No Worse Off' Limitation on Liability"*, University of Western Australia Law Review, Vol. 49, 2022.

Richard W. Wright, *"The Grounds and Extent of Legal Responsibility"*, SAN DIEGO LAW REVIEW, Vol. 41, 2003.

Richard W. Wright, *"The Principles of Justice"*, NOTRE DAME LAW REVIEW 1859 (2000) *PROPTER HONORIS RESPECTUM*: JOHN FINNIS.

Siti Hapsah Isfardiyana, *Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas dalam Pelanggaran Fiduciary Duty*, Jurnal Ilmu Hukum PADJAJARAN Volume 2 Nomor 1 Tahun 2015 (ISSN 2460-1543) (e-ISSN 2442-9325), 2015.

UNCAC, 2012, *Review of Implementation of the United Nation Convention Against Corruption*.

### **Hasil Penelitian**

Hendry Julian Noor, 2018, *Kerugian Keuangan Negara dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Negara Berbentuk Perseroan Terbatas, Perspektif Hukum Bisnis dan Tindak Pidana Korupsi*, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

### **Makalah dan Presentasi**

Asep N. Mulyana, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Banten, 2021, *Business Judgment Rule vs Tindak Pidana Korupsi*. Disampaikan pada Workshop Online yang diselenggarakan oleh VISI INTEGRITAS d, 5 Februari 2021.

Febri Diansyah, 2022, Memahami Tindak Pidana Korupsi untuk Pencegahan dan Perlindungan Hukum di Perusahaan, disampaikan pada diskusi Pertamina Gas, 17 November 2022.

Feri Wibisono, Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan Agung RI, 2021, Fiduciary Duty, Ultra Vires & Risiko Hukum dalam Pengelolaan Perseroan. Disampaikan pada Anticorruption Leaders Training, Jakarta, 3 November 2021.

Nindyo Pramono, 2023, BJR dalam Pelaksanaan Pengurusan PT, disampaikan pada kuliah Pasca Sarjana FH Undip Semarang pada 4 September 2023.

### **Internet/Website**

<https://kpk.go.id/id/publikasi-data/statistik/penindakan-2>. (Diakses: 1 April 2025)

<https://www.hukumonline.com/berita/a/pakar-fhui--secara-hukum-keuangan-bumn-jelas-bukan-kekayaan-negara-lt6358b1f3c3e4a/>. (Diakses 29 Agustus 2023)

<https://ugm.ac.id/id/berita/9935-12-tahun-berlaku-uu-bumn-siap-direvisi/>, 21 April 2015. (Diakses 9 September 2024).

<https://berkas.dpr.go.id/puuekkukesra/na/file/na-107.pdf>. (Diakses: 20 Oktober 2024).

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-undang Nomor 7 tahun 2006 tentang Pengesahan *United Natlons Convention Against Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003)

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2022 tentang Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005

tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara

Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: Per-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN

Peraturan Menteri BUMN Nomor: Per-5/MBU/09/2022 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada BUMN

Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-2/Mbu/03/2023 Tentang Pedoman Tata Kelola Dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.

Keputusan DPR RI Nomor: 4/DPR-RI/III/2015-2016 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-undang Prioritas Tahun 2016 dan Perubahan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-undang Tahun 2015-2019

### **Rancangan Undang-undang**

Daftar Inventaris Masalah (DIM) Rancangan Undang-undang Nomor ... Tahun ... tentang Perseroan Terbatas. (Diakses melalui Arsip Legislasi website DPR <https://www.dpr.go.id/arsip/indexlg/id/183>)

Badan Keahlian DPR-RI, Draf Naskah Akademik Rancangan Undang-undang tentang Badan Usaha Milik Negara, Mei 2021

### **Putusan Pengadilan**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XI/2013 tanggal 18 September 2014

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XV/2016 tanggal 25 Januari 2017

Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 32/PUU-XVII/2019 tanggal 23 Oktober 2019.

Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 114/PUU-XXII/2024 tanggal 3 Oktober 2024

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 121 K/Pid.Sus/2020.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 2935 K/Pid.Sus/2021.

Putusan Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat 33/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst.

Putusan Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat No. 36/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST.

Putusan Mahkamah Agung No. 417 K/Pid.Sus/2014

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1101 K/Pid.Sus/2020

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang No.  
69/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang No.  
71/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

### **Kamus**

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan  
Kebudayaan RI, 2018, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima*.

Bryan A. Garner & Henry Campell Black, *Black's Law Dictionary*, Eight Edition.

\* \* \*